



Iodisasi garam konsumsi



© BSN 1987

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang menyalin, menggandakan dan mengumumkan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun dan dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

BSN
Gd. Manggala Wanabakti
Blok IV, Lt. 3,4,7,10.
Telp. +6221-5747043
Fax. +6221-5747045
Email: dokinfo@bsn.go.id
www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 110/MEN.KES/XI/75
TENTANG
IODISASI GARAM KONSUMSI**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan penyakit gondok endemik dianggap perlu untuk melaksanakan iodisasi pada garam konsumsi;
b. bahwa perlu ditetapkan dosis iodisasi pada garam konsumsi tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar pasal 17, ayat (1) dan ayat (3);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131: (Tanbahan Lembaran Negara Nomor 2068);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1974 tentang Perbaikan Menu Makanan Rakyat.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39/III/Kab/B.VI/73 tanggal 6 Maret 1973 tentang Produksi dan Peredaran Makanan dan Minuman.

Memperhatikan : Laporan Komisi Teknik Perbaikan Menu Makanan Rakyat tanggal 15 September 1975.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN TENTANG IODISASI GARAM KONSUMSI.

Pertama : Dosis iodisasi pada garam konsumsi sebesar 40 bagian persepuluh Kalium yodat (40 p.p.m. KIO_3) pada tingkat produksi.

Kedua : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 29 Nopember 1975

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

(G.A. SIWABESSY)

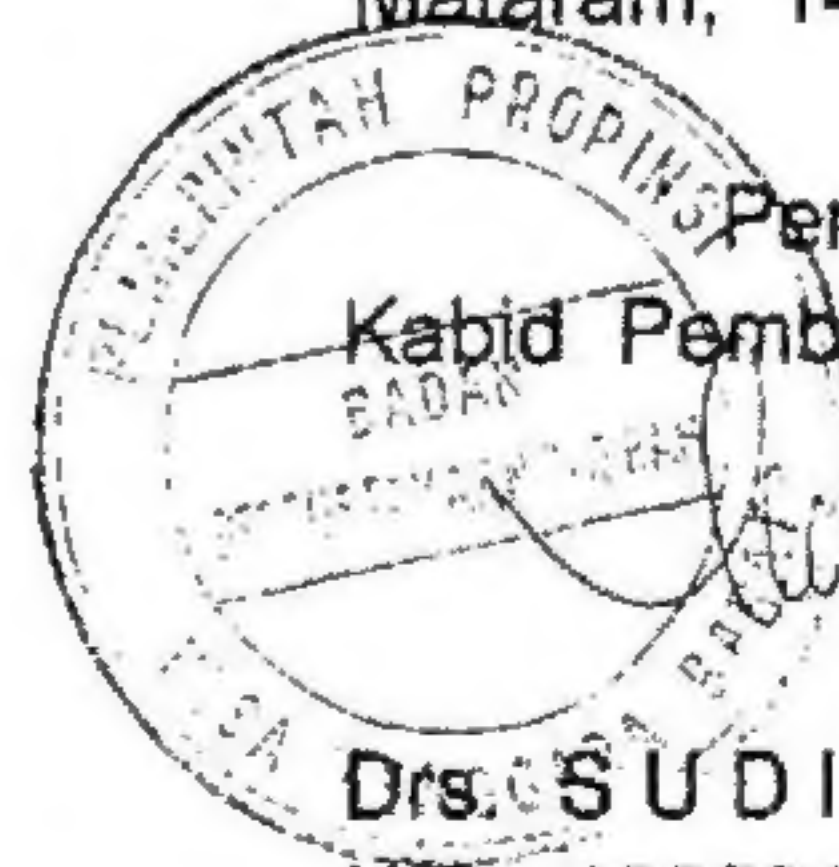
SALINAN PERATURAN ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat RI.
2. Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI.
3. Menteri Pertanian RI.
4. Menteri Dalam Negeri RI.
5. Menteri Penerangan RI.
6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.
7. Menteri Agama RI
8. Menteri Perindustrian RI.
9. Menteri Keuangan RI.
10. Pengawas Kepala Dinas Kesehatan Propinsi di seluruh Indonesia.
11. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Dep. Kes. RI.



NOMOR	NAMA INSTANSI	TANDA TANGAN
31	Kepala Badan Perpustakaan Daerah NTB	31 <i>[Signature]</i>
32	Kabid Layanan, Pelestarian dan Automasi	32 <i>[Signature]</i> Ratnawati
33	Kabid Pengembangan dan Deposit	33 <i>[Signature]</i> M. H. H.
34	Kabid Pembinaan	34 <i>[Signature]</i> S. H. H.
35	BKID Kota Mataram	35 <i>[Signature]</i>
36	BKID Kabupaten Lombok Barat	36 <i>[Signature]</i>
37	KADIN DAERAH Kota Mataram	37 <i>[Signature]</i> Nanto
38	KADIN DAERAH Lombok Barat	38 <i>[Signature]</i> S. H. H.
39	Dinas Transmigrasi Kota Mataram	39 <i>[Signature]</i> S. H. H.
40	Dinas Transmigrasi Kabupaten Lombok Barat	40 <i>[Signature]</i> M. H. H.

Mataram, 14 Agustus 2001



Penyelenggara
Kabid Pembinaan Perpustakaan

Drs. SUDIARTO
NIP : 130534812







BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 3-4
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
Telp: 021- 574 7043; Faks: 021- 5747045; e-mail : bsn@bsn.or.id